

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA FOKUS DI DESA NEKAN KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

Martha Mona

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Untan

Email:martha.mona90@gmail.com

Abstrak :

Judul penelitian ini adalah "Implementasi Kebijakan Program Desa Fokus Di Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau" Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi yang relevan tentang implementasi kebijakan Program Desa Fokus di Kabupaten Sanggau, khususnya di Desa Nekan Kecamatan Entikong yang berada di wilayah perbatasan. Judul penelitian ini diangkat berdasarkan fenomena dalam implementasi kebijakan Program Desa Fokus di Desa Nekan Kecamatan Entikong yang diindikasikan belum sepenuhnya mampu membawa kontribusi positif bagi kemajuan, kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Nekan, sebagaimana tujuan awal program tersebut.

Sesuai dengan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan Program Desa Fokus di Desa Nekan. Dan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut diperoleh dengan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, masih terdapat program yang diseleggarakan pemerintah melalui kebijakan Program Desa Fokus yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga tidak terlaksana dengan maksimal, dan terdapat pengerjaan program yang belum maksimal yang di sebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah alokasi waktu dan finansial, maupun masalah interen organisasi penyelenggara kebijakan, terutama yang menyangkut bidang pendidikan dan infrastruktur yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Infrastruktur, dan Pendidikan

Abstract:

The title of the research is "The Policy Implementation of Focus Village Program in the Nekan Village in the district of Entikong, Region of Sanggau". This reseach is intended to produce a relevant recommendation about The Policy Implementation of Focus Village Program in the Region of Sanggau, especially in the Nekan Village, in the district of Entikong which is located in border territory.

The title of this thesis raised based on the phenomenon of the implementation of the policy at the focus Village Program in the Nekan village, the District of Entikong which is indicated that it has not fully able to bring the positive contribution to the progress, prosperity and improving the quality of human resources in the nekan village as the original purpose of the program. According to these problems, this research use qualitative research types, with descriptive methods. The Subjects in this research are the government and the people involved in the implementation of the policy at the focus Village Program in the Nekan village. And the data that related to the object of the research was obtained by the three techniques of data collection, the interview technique, observation, and documentation.

The conclusion of this research is, there are still programs that implemented by government trough the policy of focus village that is not proper yet to the needs of rural communities so that it has not implemented to the maximum, and there is a work program that has not been up that is caused by several factors such as the allocation of time and financial issues, as well as the policy intern organizers issues, particularly those involving to the education and infrastructure that become the focus of this research.

Keywords: Policy Implementation Processes, Infrastructure, and Education

A. Pendahuluan

Kebijakan publik dipahami sebagai suatu keputusan atau tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan publik. Dengan demikian, agar maksud dari kebijakan tersebut dapat tercapai maka kebijakan publik yang telah diputuskan harus melalui tahap implementasi, yaitu tahap ketika kebijakan publik tersebut dilaksanakan sesuai dengan sasaran dari tujuan sebelumnya. Namun demikian, pada tataran implementasi suatu kebijakan publik tidak jarang berakhir pada kegagalan dalam mencapai tujuannya, yang disebabkan oleh berbagai faktor baik internal pelaksana maupun pada lingkungan eksternal pelaksana. Bentuk dari kebijakan publik yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan publik dalam bentuk program kebijakan daerah, yaitu kebijakan program Desa Fokus di Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Bupati Sanggau No.363 tahun 2009 tentang Penetapan Desa Binaan di Wilayah Kabupaten Sanggau. Program yang dilatarbelakangi oleh lambannya pembangunan dan minimnya pemberdayaan masyarakat desa ini diindikasikan belum mampu berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, terutama fokus pada bidang infrastruktur dan pendidikan. Indikasi tersebut dapat dinilai dari beberapa hal, terutama dari sisi waktu pelaksanaan kebijakan. Kebijakan program desa fokus di Desa Nekan telah dilaksanakan sejak oktober 2009, yang berarti sudah berjalan selama hampir 3 tahun hingga penelitian ini dilakukan. Namun pada realitasnya, keadaan infrastruktur di Desa Nekan dideskripsikan sebagai jalan desa dengan lebar hanya 1,5 meter dan dalam keadaan rusak, demikian halnya dengan sumberdaya manusia di Desa Nekan yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari data tentang kualitas pendidikan penduduk desa, serta minimnya keterlibatan masyarakat untuk turut serta dalam program pemberantasan tuna aksara. Selain permasalahan yang dipaparkan di atas juga terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan program desa fokus, seperti lemahnya pengawasan pemerintah serta pihak berwenang terhadap kinerja implementor, kurangnya sosialisasi program kebijakan terhadap masyarakat yang menjadi

sasaran program, kegiatan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sampai pada rendahnya kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk maju dan terlibat dalam pelaksanaan program, yang berujung pada implementasi kebijakan publik yang gagal.

Peneliti merumuskan masalah penelitian ini untuk mengetahui, mengapa proses implementasi dari Program Desa Fokus di Desa Nekan Kecamatan Entikong Wilayah Perbatasan Kabupaten Sanggau, belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan bidang pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Desa Nekan. Sejalan dengan rumusan masalah, fokus penelitian dan perumusan masalah yang telah disusun, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa proses implementasi Program Desa Fokus di Desa Nekan belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan di dasarkan pada teori proses implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam faktor yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya kebijakan, Karakteristik Organisasi Pelaksana Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana Kebijakan, Sikap/disposisi Pelaksana Kebijakan, Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik kebijakan, terutama pada bidang infrastruktur dan pendidikan di Desa Nekan Kecamatan Entikong.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas dari setiap kebijakan yang diambil sehingga lebih efektif dan efisien bagi masyarakat, terutama dalam kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan di bidang infrastruktur dan pendidikan, serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap implementasi Kebijakan Program Desa Fokus selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat Desa Nekan yang menjadi sasaran program, sehingga dapat mengubah pola pikir, pengetahuan dan kesadaran untuk lebih terbuka dan turut terlibat dalam implementasi kebijakan pemerintah, sehingga tujuan program demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri lebih mudah untuk dicapai.

B. Kerangka Teori Dan Metodologi

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan satu dari tiga (3) tahap pokok dalam proses kebijakan publik, selain pada tahap formulasi dan kemudian evaluasi. Tahapan implementasi bersifat *crucial* karena “bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa terwujudkan” (Widodo,2008:85). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Winarno dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) bahwa “suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan” (Winarno, 2012:37). Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kegagalan implementasi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Badjuri & Yuwono, (2003:123), yaitu:

1. Spesifikasi kebijakan yang tidak lengkap.
2. Instansi yang tidak cocok.
3. Tujuan yang saling berlawanan.
4. Insentif tidak memadai.
5. Ketidakjelasan arah implementasi.
6. Keterbatasan keahlian.
7. Sumber daya administrasi yang terbatas
8. Kegagalan komunikasi.

Pada konteks yang lebih luas, implementasi juga dapat dimaknai sebagai “pelaksana undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program” (Winarno, 2012:147). Berdasarkan teori Edward III, implementasi atau pelaksanaan Kebijakan Publik dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu “komunikasi, sumber daya, disposisi/perilaku pelaksana, dan struktur birokrasi” (Nugroho, 2008:447). Dari pendapat Edward III tersebut maka dapat ditegaskan bahwa, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, arahan terhadap implementasi kebijakan harus dijalankan secara tepat, jelas, dan konsisten. Dengan demikian suatu pola implementasi yang tepat, jelas, akurat dan konsisten merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan. Berikut adalah uraian untuk mendalami makna dari keempat faktor yang dikemukakan oleh Edward III, yang dikutip dalam (Mulyo,2009) :

- a. Komunikasi : Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan - tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian

- b. Tujuan kebijakan tersebut dengan cara dikomunikasikan secara tepat.
- b. Sumber daya:Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program pada tataran implementasi.
- c. Disposisi atau Sikap : Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apakah para implementor memiliki motivasi untuk mendukung program yang ada ataukah justru sebaliknya.
- d. Struktur Birokrasi : Badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Namun, dalam praktek tidak jarang pekerjaan masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi, dan implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi justru menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Howlett dan Ramesh menyatakan bahwa kesuksesan implementasi sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut, Badjuri dan Yuwono, (2003:113) yaitu :

1. Pemahaman terhadap pangkal permasalahan.
2. Pemahaman terhadap tingkat keakutan suatu masalah.
3. Pemahaman terhadap besar/kecilnya kelompok target kebijakan.
4. Pemahaman terhadap dampak yang diharapkan.

Dengan beberapa ukuran tersebut, maka “implementasi kebijakan juga harus dilakukan dalam konteks yang menyeluruh dengan tujuan serta target yang jelas, prioritas yang jelas, serta sumber daya pendukung yang jelas” Badjuri dan Yuwono,(2003:114). Model lain dalam implementasi kebijakan juga dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975 : 46) yang menyangkut enam faktor sebagai berikut ;

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya Kebijakan
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana Kebijakan
4. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana Kebijakan
5. Sikap/disposisi Pelaksana Kebijakan
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Kebijakan

Secara rinci faktor-faktor implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn

dapat dijelaskan sebagai berikut, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan ditelaah secara lebih mendalam. Sebagaimana dalam (Agustino, 2006:142), sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan: Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumber daya : Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, selain itu ada juga sumberdaya waktu dan finansial.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana Kebijakan: Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.
4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Kebijakan: Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.
5. Sikap/Kecendrungan (*disposition*) Pelaksana Kebijakan :sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Kebijakan: Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Program Desa Fokus di Desa Nekan Kecamatan Entikong ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif, peneliti ingin

mengidentifikasi dan mendeskripsikan hal-hal yang terjadi dalam Implementasi Program Desa Fokus di Desa Nekan Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi melalui informan yang ditentukan dengan teknik purposive. Teknik *purposive* digunakan dalam penelitian ini karena subjek atau informan dalam penelitian ini sebagian merupakan subjek yang terlibat dan memahami tentang kebijakan serta dianggap ahli pada bidangnya. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu cara dalam menguji keabsahan data, yaitu dengan proses triangulasi. Triangulasi adalah "teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu" Affifuddin dan Saebani (2009:143).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bidang infrastruktur

Dalam memahami penelitian pada bidang infrastruktur di Desa Nekan, peneliti berusaha menghimpun pendapat dari informan yang terlibat dalam program kebijakan Desa Fokus, yang terdiri dari pihak pemerintah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Camat Entikong, Kepala Desa Nekan, sampai pada masyarakat Desa Nekan sebagai sasaran program. Pada bidang infrastruktur, yang secara langsung dibawah oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sanggau melalui sekretaris dinasnya, didapat keterangan bahwa sejauh ini dalam pelaksanaan Kebijakan Program Desa Fokus tidak mengalami hambatan yang berarti. Pihak Dinas PU juga menambahkan bahwa program dari dinas adalah membangun jalan dan melakukan perbaikan jalan rusak yang merupakan akses utama bagi penduduk desa untuk melakukan mobilitas. Pihak kecamatan, yang diwakili oleh Camat Entikong juga menambahkan kebijakan Program Desa Fokus yang menyangkut Infrastruktur keberhasilannya jelas terlihat. Pihak kecamatan menilai infrastruktur jalan di Desa Nekan telah membawa pengaruh yang sangat positif bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat desa.

Keterangan dari beberapa informan tersebut menjelaskan bahwa program desa fokus di Desa Nekan pada bidang infrastruktur telah berjalan sebagaimana adanya. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak pemerintah desa dan masyarakat Desa Nekan, sebagian besar masyarakat dan pihak pemerintah mengaku kecewa dengan hasil pengerjaan jalan yang dinilai kurang maksimal. Bangunan jalan yang belum terselasaikan tersebut baru berumur

sekitar dua tahun, namun kini keadaan jalan sudah dalam keadaan rusak. Keadaan tersebut juga disebabkan oleh rendahnya kualitas material yang digunakan. Masalah ini dapat terjadi baik karena faktor internal seperti lemahnya pengawasan pihak yang bersangkutan terhadap kinerja implementor, maupun oleh faktor eksternal yang disebabkan oleh sulitnya distribusi material bangunan menuju lokasi pembangunan dalam jumlah yang mencukupi. Namun demikian, kondisi infrastruktur Desa Nekan pasca kegiatan program desa fokus kini diakui masyarakat desa lebih baik, sehingga jalan masih dapat digunakan masyarakat desa untuk melakukan distribusi barang kebutuhan dan memperlancar akses mobilitas penduduk desa.

2. Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan yang dibawah oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sanggau, khusus untuk kebijakan program desa fokus terdapat tiga program pokok yang dilaksanakan, yaitu program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan perpustakaan, dan program pemberantasan tuna aksara di Desa Nekan. Pada tataran implementasi untuk tiga program tersebut berdasarkan hasil penelitian melalui proses wawancara kepada informan, didapat keterangan bahwa tidak semua dari tiga program tersebut berjalan dengan lancar, terutama pada program pemerantasan tuna aksara. Program pemberantasan tuna aksara merupakan salah satu program yang dianggap penting oleh pihaka pemerintah sebagai salah satu usaha dalam membangun kualitas sumber daya manusia di desa, terlebih jika mengingat bahwa Desa Nekan secara geografis berada pada wilayah perbatasan yang menuntut kualitas sumberdaya manusia untuk dapat bersaing dengan baik dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Namun pada tataran implementasi, khusus pada program tersebut, masyarakat desa justru beranggapan bahwa kebijakan tersebut tidak dibutuhkan, mengingat pekerjaan pokok masyarakat desa sebagai petani, sehingga tidak memerlukan keahlian khusus yang mengharuskan masyarakat untuk bisa membaca dan menulis. Dengan demikian dua pemahaman tersebut saling bertentangan, yang berujung pada minimnya keterlibatan masyarakat dalam program tersebut sehingga tidak berjalan dengan baik dan jauh dari target yang hendak dicapai oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitan, perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut dapat disebabkan oleh satu dari enam faktor penting dalam teori implementasi kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, yaitu lemahnya komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan, yang dinilai dari lemahnya komunikasi antara pemerintah sebagai implementor kebijakan dengan masyarakat desa sebagai sasaran

kebijakan, sehingga menghasilkan program yang dinilai kurang tepat dengan kebutuhan masyarakat.

D. Kesimpulan dan Keterbatasan

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan, secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program desa fokus di Desa Nekan memang belum dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan enam faktor dalam implementasi kebijakan publik sesuai teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, umumnya semua memiliki keterkaitan yang erat terhadap efektifitas implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, fakta dari penelitian tersebut jelas telah menjawab tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan program desa fokus di Desa Nekan belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Nekan, terutama yang berkaitan dengan bidang infrastruktur dan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan bagi pemerintah yang berperan penting baik dalam proses perumusan, implementasi, sampai pada evaluasi kebijakan publik agar lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, sehingga realisasi kebijakan melalui program yang telah disusun benar-benar berarti untuk kepentingan masyarakat. Upaya mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan melalui adanya komunikasi yang dikemas dengan baik, antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan tugas lain yang juga perlu dilakukan oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan adalah adanya sikap yang lebih peka terhadap apa yang betul-betul dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, turut terlibat dalam program-program pemerintah, agar kemudian kebijakan tersebut dapat berjalan efektif serta sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri.

2. Keterbatasan

Sebagai sebuah laporan penelitian, peneliti telah berusaha untuk menyusun laporan penelitian dengan sebaik mungkin. Namun demikian, peneliti mengakui bahwa laporan penelitian ini senyatanya masih jauh dari kata sempurna, baik itu disebabkan oleh kekurangan teori, data, maupun analisis yang masih kurang tajam yang terjadi baik karena kelemahan peneliti maupun karena masih sangat kurangnya pengalaman peneliti dalam hal ini. Kekurangan dari laporan ini juga disebabkan oleh beberapa hal dan situasi yang berada diluar kemampuan peneliti untuk diatasi secara langsung, seperti keterbatasan waktu bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang mendalam berkenaan dengan objek penelitian, minimnya dokumen

tertulis berupa artikel dan opini dalam koran maupun internet yang berkenaan dengan objek penelitian, dan jauhnya jarak tempuh yang harus dituju oleh peneliti ke lokasi penelitian dengan infrastruktur yang kurang memadai, serta kesulitan untuk bertemu dengan subjek penelitian, terutama subjek penelitian di tingkat desa, karena perangkat desa dan penduduk setempat lebih disibukkan oleh kegiatan pertanian dan perkebunan.

E. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelesaian penelitian ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau, Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kecamatan Entikong, Pemerintah Desa Nekan, dan masyarakat Desa Nekan, atas kerjasama dan kemudahan yang diberikan.

F. Daftar Pustaka

Referensi Bacaan :

Affifuddin., Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Van Metter, Donald.S. and Van Horn, Charl.E. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Frame Work, Administration and Society*. 1975.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

Rujukan Elektronik:

Mulyono. 2009. *Free Writing In The Wall*. Melalui <http://mulyono.staff.uns.ac.id>, [24/4/12].

Dokumen Resmi :

Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Sanggau No.363 tahun 2009 tentang *Penetapan Desa Binaan di Wilayah Kabupaten Sanggau*.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL ILMIAH**
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama Lengkap : MARTHA MONA
NIM / Periode Lulus : E42008018 / 2012
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : martha.mona90@gmail.com/087818411149
Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DESA FOKUS DI DESA NEKAN
KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal
14/1/2013

Drs. H. Agus Eka, M.Si.
NIP. 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal :

(Martha Mona)